

HASIL PENCERMATAN DATA PEMILIH

Bawaslu Temukan KK Tampungan di 3 Kapanewon

SLEMAN (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman masih menemukan Kartu Keluarga (KK) tampungan di tiga kapanewon dalam pencermatan data pemilih Pemilu 2024. Selain itu masih ditemukan data pemilih anak di bawah umur, orang meninggal dunia, TNI/Polri, pemilih ganda dan lainnya. Atas temuan tersebut, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk ditindaklanjuti.

Ketua Bawaslu Sleman M Abdul Karim Mustofa mengaku sejak 12 Februari 2023 yakni masa pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih hingga Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) telah menemukan sejumlah temuan data pemilih. Di antaranya masih ditemukan KK tampungan di tiga ka-

panewon yakni Prambanan, Mlati dan Turi. "Data ini kami dapat dari Panwaslu kapanewon dan kalurahan. Ternyata masih ditemukan KK tampungan di Prambanan ada 94 pemilih dengan 5 KK, Mlati 140 pemilih dan Turi 14 pemilih dengan 1 KK," kata Karim dalam acara Publikasi dan dokumentasi

pengawasan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Sleman, Rabu (21/6). Menurutnya, KK tampungan itu sebenarnya kebijakan Tahun 2017 untuk persiapan Pemilu 2019. KK tampungan untuk menampung pemilih yang sudah meninggal dunia tapi belum punya akte kematian, keberadaannya tidak

diketahui atau pindah alamat. "Sebenarnya Tahun 2019 itu sudah dihapus. Tapi ternyata saat ini masih kami temukan. Untuk menghapus KK itu harus ada surat dari pejabat kelurahan karena kalau tiba-tiba dicoret, nanti bisa menghilangkan hak pemilih seseorang," ujarnya. Di samping itu, Bawaslu Sleman juga menemukan data pemilih yang meninggal dunia sebanyak 923, anggota TNI 1 orang, anggota Polri 4, pemilih bukan penduduk setempat 67 orang, pemilih hilang ingatan 37 orang. Kemudian anak di bawah umur 5

orang, pemilih pindah domisili 450 orang, pemilih alamat RT 0/RW 0 sebanyak 8.238 orang, potensi ganda 161, memenuhi syarat belum terdaftar 35 orang dan lain-lain 22. "Untuk *by name by address* sudah kami input datanya. Kemudian juga kami serahkan ke KPU Kabupaten Sleman," terangnya. Karim berharap, rekomendasi dari Bawaslu untuk ditindaklanjuti oleh KPU Sleman dalam perbaikan data pemilih. Harapannya data pemilih tetap di Kabupaten Sleman valid, akurat dan akuntabel.



KR-Saifullah Nur Ichwan

Bawaslu Sleman saat menyampaikan hasil temuan pengawasan pemutakhiran data pemilih.

"Ini merupakan hal urgen yang segera ditindaklanjuti oleh KPU Sleman. Sehingga nanti DPT di

Kabupaten Sleman memang valid, akurat dan akuntabel," tegasnya. (Sni)-

Jaga Warga Redam Konflik Sosial



KR-Istimewa

Wabup Danang Maharsa memakaikan rompi kepada perwakilan Jaga Warga.

SLEMAN (KR) - Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa minta pemerintah dan masyarakat terus bersinergi dalam menjaga kondusivitas di tengah masyarakat, khususnya je-

lang Pemilu serentak 2024. Jaga warga memiliki peranan penting dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak pilih dan kedewasaan dalam

berdemokrasi. "Diharapkan Jaga Warga dapat berperan aktif dalam meminimalisasi potensi konflik sosial akibat perbedaan aspirasi dalam Pemilu," jelas Danang pada sosialisasi kepemiluan bagi kelompok Jaga Warga di Kapanewon Ngemplak dan Ngaglik, Rabu (21/6). Danang sekaligus membagikan rompi secara simbolis kepada kelompok Jaga Warga di dua kapanewon tersebut. Sosialisasi juga menghadirkan narasumber anggota DPRD DIY Koeswanto yang berharap dengan adanya Jaga Warga ini, konflik terkait Pemilu

dapat diselesaikan dan diantisipasi di lingkup terkecil dalam masyarakat. "Karena Jaga Warga ini lingkungannya padukuhan. Di lingkup ini masyarakat saling mengetahui karakter warganya, sehingga diharapkan permasalahan bisa diselesaikan di tingkat terbawah," ujarnya. Koeswanto juga menegaskan kepada masyarakat untuk menghindari adanya praktik politik uang jelang Pemilu nanti. Diharapkan masyarakat lebih selektif dalam memilih para calon pemimpin dan wakil rakyat berdasarkan rekam jejaknya. (Has)-f



Wujudkan Idul Adha Aman dan Penuh Makna

KURANG dari sepekan umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha, sebuah hari yang memiliki makna luar biasa. Idul Adha sejatinya bermakna sebagai sebuah refleksi diri untuk menaati perintah Allah SWT, sekaligus menghidupkan semangat berbagi rezeki kepada saudara kita.

Namun perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban juga menimbulkan limbah hewan kurban yang perlu dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Selama ini banyak ditemui limbah penyembelihan hewan kurban dibuang ke sungai. Tentunya praktik ini sangat disayangkan, mengingat limbah hewan kurban seperti darah, usus dan kotoran mengandung bakteri yang dapat merusak lingkungan jika dibuang sembarangan.

Seyogyanya limbah penyembelihan hewan kurban dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Sesuai anjuran Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat sebaiknya menggali lubang pembuangan limbah hewan kurban yang ditutup kembali setelah selesai penyembelihan. Dengan cara tersebut diharapkan limbah tidak mencemari sungai dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat yang memanfaatkan sungai tersebut.

Idul Adha juga identik dengan semangat berbagi bagi sesama. Momen pembagian daging kurban merupakan momen yang ditunggu oleh seluruh masyarakat. Semangat berbagi ini sebaiknya juga dikemas dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Selama ini banyak dijumpai pembagian daging kurban menggunakan kantong plastik yang kita ketahui merupakan salah satu limbah yang sulit diurai. Selain merusak lingkungan, kantong plastik hitam juga buruk bagi kesehatan karena berasal dari proses daur ulang yang sumbernya bisa dari berbagai lim-

Bupati Kustini



bah. Kantong plastik tidak memiliki kualitas 'food grade' mengandung zat karsinogen serta bahan kimia lainnya. Sangat disayangkan jika semangat berbagi ini justru menimbulkan masalah baru bagi lingkungan kita. Oleh karena itu melalui tulisan ini saya mengimbau seluruh panitia penyembelihan kurban untuk beralih menggunakan kemasan ramah lingkungan seperti daun jati, daun pisang atau besek yang lebih ramah lingkungan serta tidak berdampak buruk bagi kesehatan.

Sebagai pedoman pemotongan hewan kurban, Pemkab Sleman telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Sleman No.032 Tahun 2023 tentang Panduan Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan. Sebelumnya, Pemkab Sleman juga telah melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan kurban di setiap kapanewon dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan dan upaya pengendalian penyakit PMK, LSD dan PPR.

Tidak hanya itu selama pelaksanaan penyembelihan, Pemkab Sleman akan menugaskan 300 orang petugas pengawasan pemotongan hewan kurban yang dikoordinasikan oleh 14 Puskesmas. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman juga sosialisasi dan pembekalan kepada 40 mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM untuk turut mengawasi pelaksanaan penyembelihan tersebut. Dengan upaya ini saya harap dapat meminimalisasi kesalahan dalam proses penyembelihan dan pengelolaan limbah hewan temak.

Melalui tulisan ini saya mengajak seluruh warga Sleman untuk merayakan Idul Adha dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Mari kita gunakan wadah alternatif, Idul Adha akan semakin berkah dengan mengurangi kantong plastik. □-f

Pembeli Apartemen MCR Datangi Dewan

SLEMAN (KR) - Perwakilan Persatuan Pemilik Apartemen Malioboro City Regency (PPAMCR), kemarin beraudiensi ke Komisi A DPRD Sleman. Sampai saat ini, para pembeli Apartemen Malioboro City Regency (MCR) belum memiliki legalitas. Para pembeli berharap aset para pembeli tidak hilang karena apartemen sudah ganti pemilik.

Koordinator PPAMCR Edi Hardiyanto mengatakan, para konsumen ini memang sudah mendapatkan kunci dan menempati atau menyewakan aparte-

men tersebut. Namun mereka belum mendapatkan legalitas seperti Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas unit

MCR. "Memang kami sudah menerima unitnya dan hanya berpegangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) saja dari pihak



KR-Saifullah Nur Ichwan

Perwakilan PPAMCR saat audiensi dengan Komisi A DPRD Sleman.

pengembang. Tapi secara legalitas, kami belum terima karena belum ada AJB dan SHM," kata Edi.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sleman Hasto Karyanto SIP mengaku akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait atas masalah tersebut. Harapannya pemerintah daerah segera mengambil kebijakan terhadap masalah itu.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Supaya nanti ada perhatian dan segera bisa mengambil kebijakan," katanya. (Sni)-f



DPRD KABUPATEN SLEMAN SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

KINERJA KOMISI B DPRD KABUPATEN SLEMAN

Mendorong Dinas Memfasilitasi Sertifikasi Pelaku Wisata



KR-Saifullah Nur Ichwan

M Agus Mas'udi ST

SLEMAN (KR) - Komisi B DPRD Sleman mendorong Dinas Pariwisata untuk memperbanyak fasilitas sertifikasi bagi pelaku usaha wisata. Hal itu untuk memberikan jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanannya sesuai standar nasional.

Anggota Komisi B DPRD Sleman M Agus Mas'udi ST mengatakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan Standard Nasional Indonesia atau SNI pada program sertifikasi

Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sertifikasi SNI CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait pariwisata, serta destinasi pariwisata.

"Sertifikasi SNI CHSE berfungsi sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan," kata Agus, Rabu (21/6).

Menurutnya, sertifikasi bagi pelaku pariwisata itu cukup penting dilakukan di Kabupaten Sleman. Mengingat Sleman ini merupakan daerah tujuan wisata baik itu wisata domestik maupun mancanegara. "Sebagai kota wisata, para pelaku wisata di Kabupaten Sleman seharusnya memiliki sertifikasi. Makanya kami mendorong kepada Dinas Pariwisata Sleman memperbanyak memfasilitasi sertifikasi tersebut," pinta anggota Fraksi PKS ini.

Facilitasi sertifikasi ini dapat

diberikan kepada usaha pariwisata, usaha atau fasilitas lain terkait pariwisata, lingkungan masyarakat, dan destinasi pariwisata. Misalnya usaha jasa transportasi wisata, hotel, homestay atau pondok wisata, restoran, rumah makan dan usaha pariwisata lain. "Pelaku wisata itu melingkupi cukup banyak. Tidak hanya pengelola wisata saja, namun juga pendukung lainnya. Dan kami minta secara bertahap perlu difasilitasi semua," jelasnya.

Dikatakan pria yang kerap di-

panggil Gus Ud ini, pentingnya sertifikasi ini juga bagian untuk menjaga nama baik pariwisata di Kabupaten Sleman. Dengan pelayanan baik dan sesuai standar, diharapkan nantinya dapat meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan ke Bumi Sembada ini. "Kalau sudah memiliki sertifikasi, pelaku wisata dalam melayani wisatawan tidak *sembrono*. Dengan pelayanan baik, diharapkan wisatawan merasa senang dan puas yang dampaknya mampu meningkatkan tingkat kunjung-



KR-Saifullah Nur Ichwan

Komisi B menggelar rapat dengan Dinas Pariwisata Sleman.

an ke Sleman," tegasnya.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi B lainnya, Rahayu Widi Chahyani SH MM. Pihaknya juga sepakat, sertifikasi bagi pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Sleman lebih masifkan kembali. Sebagai mitra kerja Dinas Pariwisata, Komisi B siap mengawal anggaran untuk sertifikasi bagi pelaku wisata di Kabupaten Sleman. "Selama ini Dinas Pariwisata memang sudah ada program fasilitasi sertifikasi bagi pelaku wisata. Kami berharap itu lebih banyak lagi," ujar perempuan yang kerap disapa Yuyun ini.

Di samping memfasilitasi sertifikasi, dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata, Dinas Pariwisata Sleman juga perlu membanyak event di tempat wisata. Dengan memperbanyak event, diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Sleman. "Apalagi sekarang lagi musim liburan sekolah dan mendatang masih ada liburan akhir tahun. Kami minta event di tempat wisata juga diperbanyak supaya bisa menjadi magnet wisatawan



KR-Istimewa

Rahayu Widi Chahyani SH MM.

untuk berkunjung," pinta anggota Fraksi PKB itu.

Dengan tingginya tingkat kunjungan, tentu juga akan berdampak pada pelaku UMKM. Dimana produk-produk UMKM di Sleman bisa menjadi tempat tujuan wisatawan untuk mencari oleh-oleh. Sehingga nantinya roda perekonomian di Sleman kembali meningkat. "Memang imbas dari pariwisata ini cukup besar. Ketika pariwisatanya ramai, pelaku UMKM akan merasakan imbasnya. Secara otomatis ekonomi masyarakat juga meningkat," pungkas Yuyun.

(Sni)-f